

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

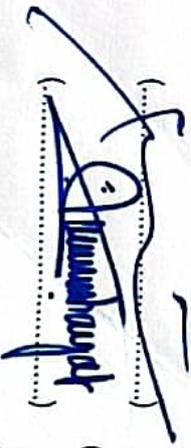
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER							Indikator Gender
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)		
Program : Pelayanan Penanaman Modal	- Luas Wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.346,20 Km ² - Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa	Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti cukup jauhnya jarak tempat masyarakat yang akan melakukan proses izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab isu dianggap sebagai isu penting yang perlu diangani secara serius 2. Kurangnya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	1. Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendapatkan dokumen yang dibutuhkan 2. Belum memadainya sarana transportasi umum bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan non perizinan maupun dokumen pribadinya 3. Masih kurangnya koordinasi antar OPD dengan instansi vertikal daerah 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan	1. Terwujudnya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dengan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang memadai baik untuk laki-laki maupun perempuan secara proposional 2. Tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi untuk berkunjung 3. Tersedianya jaringnng aplikasi secara online dalam mengurus izin untuk berinvestasi	1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis 2. Penyebarluasan promosi melalui media elektronik 3. Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis	- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa	Tersedianya Anggaran sebesar : Rp. 50.000.000,- Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Output : -Frekuensi kunjungan perizinan keliling Outcome : Tersinya dokumen perizinan dan non perizinan
Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal belum didasar Analisis (termasuk analisis Gender)	Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang						
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan pelayanan perizinan Mantaaat : Belum semua masyarakat bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin	ISU GENDER		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				

TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

 (.....)
 (.....)

**GENDER BUDGET STATEMENT / GBS
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik**

Program	Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Frekuensi kunjungan perizinan keiling
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Analisa Situasi	<p>Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti cukup jauhnya jarak tempuh masyarakat yang akan melakukan proses izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal belum didasari Analisis (termasuk analisis Gender)</p> <p>Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan</p> <p>Manfaat : Belum semua masyarakat bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p> <p>Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu diangani secara serius</p>

	<p>Kurangnya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendapatkan dokumen yang dibutuhkannya</p> <p>Belum memadainya sarana transportasi umum bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan non perizinan maupun dokumen pibadinya</p> <p>Masih kurangnya koordinasi antar OPD dengan instansi vertical daerah</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis
	Komponen 2	Penyebarluasan promosi melalui media elektronik
	Komponen 3	Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 50.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terbinya dokumen perizinan dan non perizinan	



PENGUNA ANGGARAN,
YOLLY HIRLANDES PUTRA, ST, MIL
 Nip. 19811215 200604 1 006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER						
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<p>Program : Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>- Luas Wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.346,20 Km²</p> <p>- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa</p> <p>- Banyaknya masyarakat perempuan yang datang mengurus izin ke DPKMPTSP</p> <p>- Belum tercukupinya kebutuhan atas hak-hak perempuan dan disabilitas</p> <p>- Perluaya ketersediaan sarana dan prasarana bagi pemenuhan kebutuhan perempuan dan disabilitas</p>	<p>Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti sarana dan prasarana gedung kantor yang belum mencukupi untuk kebutuhan perempuan dan disabilitas</p> <p>Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didasari Analisis (termasuk analisis Gender)</p> <p>Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dalam pelayanan perizinan</p>	<p>1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu dilangani secara serius</p> <p>2. Belum cukunya ketersediaan sarana dan prasarana perempuan dan disabilitas</p> <p>3. Keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan perempuan dan disabilitas dalam design gedung kantor</p>	<p>Belum adanya aturan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan perempuan dan disabilitas dalam hal sarana dan prasarana gedung kantor</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kenyamanan pegawai dan masyarakat dalam pelayanan.</p>	<p>1. Menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapan yang dibutuhkan</p> <p>2. Menyediakan ruang bermain anak beserta kelengkapan yang dibutuhkan</p> <p>3. Menyediakan jalur khusus disabilitas kamar mandi/wc khusus disabilitas</p> <p>4. Menyediakan kamar mandi/wc khusus disabilitas</p>	<p>- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa</p>	<p>Tersedianya Anggaran sebesar : Rp. 3.000.000.000,-</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Input : Rp. 3.000.000.000,-</p> <p>Output : -Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p> <p>Outcome : Persentase barang milik daerah yang tersedia</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL			
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender	
		Mantai : Tidak semua sarana dan prasarana untuk perempuan dan disabilitas ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin							

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD


 (.....)
 (.....)


 (.....)
 (.....)

**GENDER BUDGET STATEMENT / GBS
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Analisa Situasi	<p>Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti sarana dan prasarana gedung kantor yang belum mencukupi untuk kebutuhan perempuan dan disabilitas</p> <p>Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didasari Analisis (termasuk analisis Gender)</p> <p>Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dalam pelayanan perizinan</p> <p>Manaat : Tidak semua sarana dan prasarana untuk perempuan dan disabilitas ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p> <p>Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius</p>

	Belum cukupnya ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana perempuan dan disabilitas Keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan perempuan dan disabilitas dalam design gedung kantor		
Rencana Aksi	Komponen 1	Menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapan yang dibutuhkan	
	Komponen 2	Menyediakan ruang bermain anak beserta kelengkapan yang dibutuhkan	
	Komponen 3	Menyediakan jalur khusus disabilitas dan kamar mandi/wc khusus disabilitas	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 3.000.000.000,-		
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang tersedia		



PENGUNA ANGGARAN,

YOLLY HIRLANDES PUTRA, ST., MIL

 Nip. 19811215 200604 1 006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
ISU GENDER								
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<p>Program : Promosi Penanaman Modal</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : Meningkatnya Investasi</p>	<p>-Jumlah Investor masih sedikit yang berinvestasi</p> <p>-Jumlah promosi investasi dilakukan melalui media dan peneran dalam dan luar daerah</p> <p>-Jumlah peminat pengurus izin perempuan lebih banyak dari laki-laki</p>	<p>Akses : Pembebasan lahan yang terkendala</p> <p>Partisipasi : Masyarakat belum menerima secara terbuka terhadap investor yang mau berinvestasi</p> <p>Kontrol : Sarana dan prasarana yang belum mencukupi</p> <p>Manfaat : Belum semua investor bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p>	<p>1. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi maksimal untuk menarik investor berinvestasi</p> <p>3. Kurangnya sosialisasi pertizinan dan non pertizinan</p>	<p>1. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi</p> <p>2. Lambatnya realisasi investasi</p> <p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin pertizinan dan non pertizinan</p> <p>4. Sulitnya pembebasan lahan dari masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan investasi dari investor</p> <p>2. Tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi untuk berkunjung</p> <p>3. Memberikan pelayanan yang mudah untuk investor dalam berinvestasi</p> <p>4. Tersedianya jaringan Aplikasi secara online dalam mengurus izin untuk berinvestasi</p>	<p>1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus izin secara gratis</p> <p>2. Penyebarluasan promosi melalui media elektronik</p> <p>3. Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis</p>	<p>-Jumlah peminat pengurus izin perempuan lebih banyak dari laki-laki</p>	<p>Tersedianya Anggaran sebesar : Rp. 50.000.000,-</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Input : Rp. 50.000.000,-</p> <p>Output : -Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</p> <p>Outcome : Pentase penyelenggaraan promosi Penanaman Modal</p>

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**GENDER BUDGET STATEMENT / GBS
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Program	Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Investasi
Analisa Situasi	<p>Akses : Pembebasan lahan yang terkendala</p> <p>Partisipasi : Masyarakat belum menerima secara terbuka terhadap investor yang mau berinvestasi</p> <p>Kontrol : Sarana dan prasarana yang belum mencukupi</p> <p>Mantai : Belum semua investor bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p> <p>Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi</p> <p>SDM pengelola belum maksimal untuk menarik investor berinvestasi</p> <p>Kurangnya sosialisasi perizinan dan non perizinan</p>

	<p>Kurangnya minat investor dalam berinvestasi</p> <p>Lambatnya realisasi investasi</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan</p> <p>Sulitnya pembebasan lahan dari masyarakat/kurangnya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan</p>		
Rencana Aksi	Komponen 1	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis	
	Komponen 2	Penyebarluasan promosi melalui media elektronik	
	Komponen 3	Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 50.000.000,-		
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Persentase penyelenggaraan promosi Penanaman Modal		


PENGUNA ANGGARAN,
YOLLY HIRLANDES PUTRA, ST, MIL
 NIP. 19811215 200604 1 006